



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 96 TAHUN 2022**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperoleh informasi kinerja dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan, guna perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada tingkat pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.
7. Kinerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam Tahun 2018-2023, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
8. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan
9. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
10. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut IKU PD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis PD, sebagaimana tertuang dalam Renstra PD Tahun 2018-2023.
11. Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Tujuan Renstra PD adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
12. Sasaran Strategis Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Sasaran Strategis Renstra PD adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan PD dalam menyusun dokumen SAKIP.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis PD yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pemilihan dan pengembangan penetapan IKU;
- b. penggunaan IKU; dan
- c. pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan.

BAB II

PEMILIHAN DAN PENGEMBANGAN PENETAPAN IKU

Pasal 5

- (1) IKU yang disusun PD harus sesuai dan selaras dengan IKU Pemerintah Daerah.
- (2) IKU PD sekurang-kurangnya merupakan indikator hasil.
- (3) IKU PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Pemilihan dan penetapan IKU mempertimbangkan:

- a. dokumen RPJMD dan atau Renstra PD, kebijakan umum dan/atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta fungsi peran lainnya;
- c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
- e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB III

PENGUNAAN IKU

Pasal 7

IKU digunakan untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penganggaran;
- d. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- e. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 8

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis PD sebagaimana termuat dalam Renstra PD harus dinyatakan dengan IKU.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dan PD melakukan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU guna melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala, singkat dan jelas dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

BAB IV
PEMBINAAN, KOORDINASI, MONITORING,
EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengembangan pelaksanaan IKU.
- (2) Guna kelancaran tugas pembinaan dan pengembangan Gubernur menugaskan Sekretaris Daerah atau PD yang membidangi pengembangan akuntabilitas kinerja.
- (3) Koordinasi pengintegrasian IKU ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan.
- (4) Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan pelaksanaan IKU dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan fungsi pengawasan.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 September 2022
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 15 September 2022
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


DOMU WARANDROY

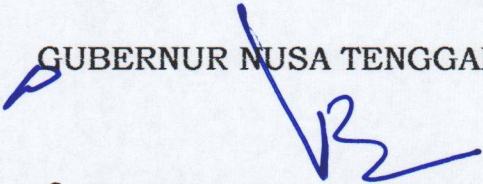
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 096

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 96 TAHUN 2022
TANGGAL : 15 September 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023

URUSAN PEMERINTAHAN YANG : • PENDIDIKAN
DILAKSANAKAN • KEBUDAYAAN

SASARAN STRATEGIS RPJMD	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DATA
Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah	APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender)	%	Dinas P&K
		APS SLB	%	Dinas P&K
	Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing	Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim (8 Unit)	Unit	Dinas P&K
	Meningkatnya cakupan SMA/SMK/SLB yg memenuhi Standar Minimal (SPM) Pendidikan	Cakupan Pemenuhan SPM Pendidikan	%	Dinas P&K
	Meningkatnya Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra	Persentase Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (12 paket bahasa dan sastra) yg dilindungi/ dikembangkan/ dibina	%	Dinas P&K
	Meningkatnya Persentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan	Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan (Budaya Tak Benda 20 unit, Bahasa Daerah 68 unit)	%	Dinas P&K
	Meningkatnya Cakupan Kesenian Tradisional Ikonik/Langka pada setiap daerah yang dilestarikan	Cakupan Kesenian Tradisional Ikonik/Langka pada setiap daerah yang dilestarikan	%	Dinas P&K
	Meningkatnya Cakupan Kesenian Tradisional Populer pada setiap daerah yang dikembangkan	Cakupan Kesenian Tradisional Populer pada setiap daerah yang dikembangkan	%	Dinas P&K
	Meningkatnya Cakupan Sejarah Lokal dari setiap daerah yang dipublikasikan	Cakupan Sejarah Lokal dari setiap daerah yang dipublikasi (Sanggar) Budaya 25 Unit)	%	Dinas P&K
	Meningkatnya Cakupan Cagar Budaya setiap daerah yang dilestarikan	Cakupan Cagar Budaya setiap daerah yang dilestarikan (Cagar Budaya 2 buah, Desa Adat 25 buah)	%	Dinas P&K
	Meningkatnya Akses masyarakat terhadap Museum	Persentase Akses masyarakat terhadap Museum (4 unit) (Total per tahun 20.000 orang)	%	Dinas P&K

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

aw

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 96 TAHUN 2022
TANGGAL : 15 September 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : • KESEHATAN
• KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SASARAN STRATEGIS RP. IMD	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Usia Harapan Hidup (tahun)	Tahun	Dinkes dukcapil
		Prevalensi Stunting (%)	%	Dinkes dukcapil
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) (Predikat)	Poin	Dinkes dukcapil
		Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah (Poin)	%	Dinkes dukcapil

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 96 TAHUN 2022
TANGGAL : 15 September 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA
RSUD PROF. DR. WZ. JOHANNES KUPANG TAHUN 2018-2023

URUSAN PEMERINTAHAN YANG : • KESEHATAN
DILAKSANAKAN

SASARAN STRATEGIS RPJMD	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DATA
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat NTT	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat NTT	Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit	%	RSUD
		Meningkatnya Kemandirian Blud RSU	%	RSUD
		Presentase SDM RSU Daerah yang ditingkatkan kompetensi dan kualifikasinya	%	RSUD

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 96 TAHUN 2022
TANGGAL : 15 September 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : • PEKERJAAN UMUM DAN PENAATAAN RUANG
• PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SASARAN STRATEGIS RPJMD	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DATA
Berkurangnya Kemiskinan	Berkurangnya angka kemiskinan dari segi hunian layak	Peningkatan cakupan Rumah layak huni	%	Dinas PUPR
		Peningkatan cakupan rumah tangga dengan sanitasi layak	%	Dinas PUPR
		Peningkatan cakupan luasan kawasan kumuh kewenangan Provinsi yang tertangani	%	Dinas PUPR
		Peningkatan Ketersediaan Prasarana dan Utilitas Umum pada Permukiman	%	Dinas PUPR
		Penurunan cakupan ketersediaan Rumah bagi warga yang terkena Bencana dan relokasi Program Pemerintah	%	Dinas PUPR
	Berkurangnya sengketa tanah lintas Kabupaten/Kota	Peningkatan persentase Rekomendasi Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi	%	Dinas PUPR
		Peningkatan Persentase Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah Provinsi	%	Dinas PUPR
		Peningkatan Cakupan Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi	%	Dinas PUPR
		Peningkatan Persentase Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi	%	Dinas PUPR
		Peningkatan persentase Fasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi serta Inventarisir dan memanfaatkan tanah kosong lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi	%	Dinas PUPR

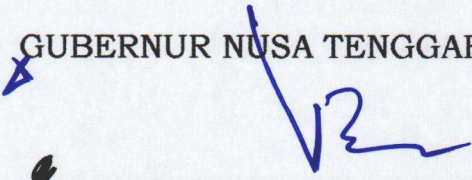
W


SASARAN STRATEGIS RRJMD	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DATA
		Peningkatan cakupan Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi	%	Dinas PUPR
Terwujudnya Konektivitas antar wilayah di dalam daerah dan keluar daerah	Meningkatnya Kualitas Jalan Kewenangan Provinsi	Peningkatan % Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	%	Dinas PUPR
		Persentase penyediaan jalan dan jembatan ke 22 Pariwisata Estate	%	Dinas PUPR
Tersedianya Infrastruktur Pengairan yang mendukung Peningkatan Produksi Pertanian	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur Sumber Daya air dan Irigasi	Peningkatan Persentase Embung dan Bangunan Penampung Air yang terbangun	%	Dinas PUPR
		Peningkatan Persentase embung Kecil yang fungsional	%	Dinas PUPR
		Peningkatan Persentase Pemeliharaan Saluran irigasi	%	Dinas PUPR
		Peningkatan Cakupan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	%	Dinas PUPR
		Persentase keberfungsian Ketembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provins	%	Dinas PUPR
		Peningkatan persentase Pemeliharaan Bangunan Perkuatan Tebing pada 22 Sungai	%	Dinas PUPR
Meningkatnya akses Masyarakat terhadap Perumahan Layak, air minum dan Sanitasi layak	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, air minum dan sanitasi	Peningkatan Persentase KK yang mampu mengakses air minum layak tingkat Provinsi	%	Dinas PUPR
		Peningkatan Persentase KK yang mampu mengakses air minum layak di Kawasan Destinasi Pariwisata	%	Dinas PUPR
		Peningkatan Cakupan Pembangunan TPA / TPST / SPA terbangun lingkup Provinsi	%	Dinas PUPR
		Peningkatan Cakupan Pengelolaan Limbah Domestik	%	Dinas PUPR
		Peningkatan Cakupan Penanganan Kawasan banjir sekitar wilayah sungai yang merupakan kewenangan Provinsi	%	Dinas PUPR
		Peningkatan Cakupan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang ditangani setiap tahun	%	Dinas PUPR
		Peningkatan Persentase KK yang mampu mengakses air minum layak di di Kawasan Destinasi Pariwisata	%	Dinas PUPR
		Peningkatan Persentase Penataan bangunan sesuai ketentuan tata bangunan	%	Dinas PUPR

SASARAN STRATEGIS RPJMD	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DATA
		Cakupan Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	%	Dinas PUPR
		Peningkatan Persentase penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan untuk kepentingan strategis daerah provinsi dan lintas Kab/Kota	%	Dinas PUPR
	Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi Nusa Tenggara Timur	Peningkatan Kualitas Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria aspek jasa konstruksi	%	Dinas PUPR
	terwujudnya Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Penataan Ruang	Peningkatan Persentase wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR	%	Dinas PUPR
		Penurunan Persentase Penyimpangan RUTR dan RDTR pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	%	Dinas PUPR

27

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



 **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 96 TAHUN 2022
TANGGAL : 15 September 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023

URUSAN PEMERINTAHAN YANG : • SOSIAL
DILAKSANAKAN

SASARAN STRATEGIS RPJMD	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DATA
Berkurangnya Kemiskinan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan penanganan kemiskinan, stunting, air minum, sanitasi dan Rumah Layak Huni	Presentase penduduk miskin, KAT kelompok rentan dan PMKS lainnya yang terakses perlindungan social	%	Dinas Sosial
		Presentase Pencapaian SPM Sosial	%	Dinas Sosial

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 96 TAHUN 2022
TANGGAL : 15 September 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023

URUSAN PEMERINTAHAN YANG : • KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
DILAKSANAKAN

SASARAN STRATEGIS RPJMD	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Meningkatnya Kualitas tata kelola penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan public yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Persentase Meningkatnya pencapaian SPM Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	%	Satpol PP Provinsi NTT
		Persentase Meningkatnya Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (jumlah perda dan perkara yang ditegakan)	%	Satpol PP Provinsi NTT
		Persentase pencegahan daerah berpotensi rawan kebakaran setiap tahun	%	Satpol PP Provinsi NTT

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 96 TAHUN 2022
TANGGAL : 15 September 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023

URUSAN PEMERINTAHAN YANG : • KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
DILAKSANAKAN

SASARAN STRATEGIS RPJMD	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DATA
Meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Menjamin Terpenuhinya Dimensi Keberlanjutan (sustainability) Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan	Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki rencana kontinjensi kebencanaan	%	BPBD Provinsi NTT
		Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana	%	BPBD Provinsi NTT
		Cakupan Pemasangan Rambu	%	BPBD Provinsi NTT
		Cakupan Desa/Kelurahan tangguh	%	BPBD Provinsi NTT

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

LAMPIRAN VIII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 96 TAHUN 2022
TANGGAL : 15 September 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023

URUSAN PEMERINTAHAN YANG : • PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DILAKSANAKAN

SASARAN STRATEGIS RPJMD	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DATA
Berkurangnya Kemiskinan	Berkurangnya kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat	Peningkatan BUMDes Aktif dan BUMdes di kawasan pariwisata	%	Dinas PMD
		Prosentase peningkatan usaha ekonomi masyarakat (alat TTG yang diserahkan ke desa)	%	Dinas PMD
		Posyandu aktif yang melaksanakan pelayanan dasar dalam setahun 12 kali	Unit	Dinas PMD
		PKK aktif yang melaksanakan pemenuhan gizi keluarga, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan	%	Dinas PMD
	Mewujudkan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	Prosentase Desa Persiapan yang telah memiliki Kode register	%	Dinas PMD
		Prosentase perubahan status desa minimal berkembang	%	Dinas PMD
		Prosentase perjanjian kerjasama desa dengan non pemerintah (BUMDes, BPKAD, BPMD, Posyandu)	%	Dinas PMD

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

LAMPIRAN IX : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 96 TAHUN 2022
TANGGAL : 15 September 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : • KOPERASI DAN UMKM
• TENAGA KERJA
• TRANSMIGRASI

SASARAN STRATEGIS RPJMD	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DATA
Terciptanya Lapangan Kerja dan Meningkatnya Produktivitas Angkatan Kerja	Terciptanya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN), Pendayagunaan Tenaga kerja sukarela, Teknologi Tepat Guna, dan Padat Karya;	% Peserta pelatihan yang bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan	%	Dinas Kop nakertrans
		% Penyerapan eks peserta pelatihan di pasar kerja	%	Dinas Kop nakertrans
		% Besaran Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%	Dinas Kop nakertrans
		% Meningkatnya PMI Prosedural	%	Dinas Kop nakertrans
	Terciptanya Hubungan Industrial yang Dinamis, harmonis, berkeadilan dan bermartabat melalui Pembinaan dan Pengembangan Sarana Hubungan Industrial, penanganan permasalahan PHI/PHK dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui perbaikan UMP dan peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	% Jumlah perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Provinsi	%	Dinas Kop nakertrans
		% Kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan	%	Dinas Kop nakertrans
	Terwujudnya perlindungan tenaga kerja yang optimal melalui pengawasan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pembinaan kepengawasan ketenagakerjaan serta peningkatan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di perusahaan	% Pemeriksaan Perusahaan oleh Pengawas	%	Dinas Kop nakertrans
		% Jumlah perusahaan yang melaksanakan norma kerja di NTT	%	Dinas Kop nakertrans
Berkurangnya Ketimpangan antar Kelompok Masyarakat dan antar wilayah	Terbangunnya Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (LPT) baru serta terfasilitasinya perpindahan dan penempatan keluarga transmigran serta terfasilitasi pembinaannya	% Kawasan dan lokasi transmigrasi yang difasilitasi pencadangannya	%	Dinas Kop nakertrans

W

2

LAMPIRAN X : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 96 TAHUN 2022
TANGGAL : 15 September 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : • LINGKUNGAN HIDUP
• KEHUTANAN

SASARAN STRATEGIS RPJMD	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Daerah	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Daerah	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial	%	DLHK
		Persentase Peningkatan Perlindungan terhadap Ekosistem Essensial di Destinasi Wisata	%	DLHK
		Peningkatan Cakupan Lahan Kritis yang Tertangani Setiap Tahun	%	DLHK
		Persentase pemenuhan SDM berkeahlian khusus	%	DLHK
		Persentase Meningkatnya Kualitas DAS	%	DLHK
		Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	%	DLHK
		Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH	%	DLHK
		Persentase peningkatan kualitas LH di suatu daerah	%	DLHK
		Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani	%	DLHK
		Persentase Pengurangan dan Penanganan Sampah	%	DLHK
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	DLHK
		Persentase limbah B3 yang diangkut atau	%	DLHK
		Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH	%	DLHK
		Persentase peningkatan kualitas LH di suatu daerah	%	DLHK

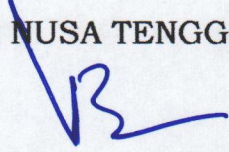
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

LAMPIRAN XI : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 96 TAHUN 2022
TANGGAL : 15 September 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023

URUSAN PEMERINTAHAN YANG : • PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DILAKSANAKAN

SASARAN STRATEGIS RPJMD	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DATA
Terjaminnya Keadilan dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Cakupan Kab/kota yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG)	%	DP3A
		Cakupan Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG)	%	DP3A
		Cakupan ketersediaan dan pemanfaatan data gender dan anak	%	DP3A
		Cakupan Desa Layak Anak Jumlah Desa yang telah mencapai tahapan desa layak anak (Target 250 Desa)	%	DP3A
	Indeks Pemberdayaan Gender	Cakupan Keluarga yang melaksanakan pola asuh setara gender (Target=750 KK)	%	DP3A
		Cakupan lembaga yang memfasilitasi terwujudnya ketahanan keluarga (Target total = 10 Lembaga)	%	DP3A
		Cakupan pendampingan Champion Gender dalam pola asuh pemenuhan hak anak untuk pencegahan stunting (Target : 500 Keluarga)	%	DP3A
	Persentase Kekerasan terhadap Anak yang Tertangani	Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap anak	%	DP3A
		Cakupan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan layanan komprehensif/sesuai standar (Target: 125 ABH)	%	DP3A
	Persentase Kekerasan terhadap Perempuan yang Tertangani	Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan	%	DP3A

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

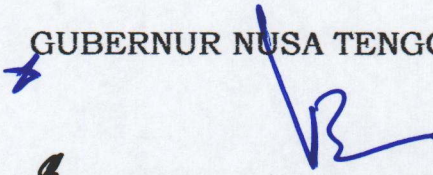
a

LAMPIRAN XII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 96 TAHUN 2022
TANGGAL : 15 September 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : • KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
• STATISTIK
• PERSANDIAN

SASARAN STRATEGIS RPJMD	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Meningkatnya Kualitas tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Indeks penyelenggaraan SPBE	skor	Dinas Kominfo
		Tingkat keterbukaan informasi publik	skor	Dinas Kominfo
		Jaringan LAN dan jaringan intranet terintegrasi pemerintah provinsi melalui NOC		Dinas Kominfo
		Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/Tidak Ada	Dinas Kominfo
		Tingkat pengamanan informasi daerah	skor/level	Dinas Kominfo
		Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup dinas kominfo	Nilai	Dinas Kominfo

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

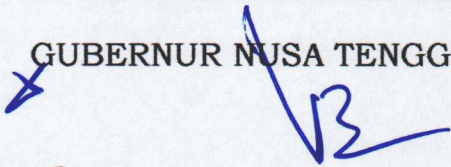
2

LAMPIRAN XIII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 96 TAHUN 2022
TANGGAL : 15 September 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023

URUSAN PEMERINTAHAN YANG : • PENANAMAN MODAL
DILAKSANAKAN

SASARAN STRATEGIS RPJMD	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah	Meningkatnya nilai realisasi investasi dan jumlah investor	Penambahan nilai realisasi investasi	Rupiah Triliun	DPMPTSP
		Persentase PMA dan PMDN yang direalisasi setiap tahun	%	DPMPTSP
		Persentase Peningkatan MOU dengan calon investor setiap tahun	%	DPMPTSP
		Persentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan yang berlaku	%	DPMPTSP
		Persentase Calon Investor yang terlayani kebutuhan datanya	%	DPMPTSP
		Persentase Calon Investor yang terlayani kebutuhan informasi perijinan investasi	%	DPMPTSP
Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.	Terwujudnya kepuasan layanan publik	Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	%	DPMPTSP
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan penanaman modal dan perizinan	Nilai	DPMPTSP
		Jumlah Inovasi Layanan	inovasi	DPMPTSP

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

9 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

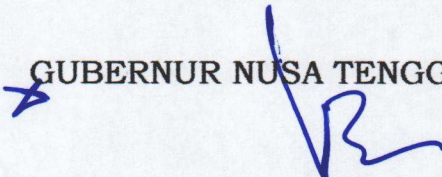
a

LAMPIRAN XIV : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 96 TAHUN 2022
TANGGAL : 15 September 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023

URUSAN PEMERINTAHAN YANG : • PERHUBUNGAN
DILAKSANAKAN

SASARAN STRATEGIS RPJMD	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DATA
Terwujudnya konektivitas antar wilayah di dalam daerah dan keluar daerah	Terwujudnya kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas daerah	Dwelling Time Pelabuhan	Hari	Dinas Perhubungan
		Cakupan Pelayanan Angkutan Darat	%	Dinas Perhubungan
		Peningkatan Cakupan fasilitas keselamatan jalan terpasang pada Ruas Jalan Provinsi	%	Dinas Perhubungan
		Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayanan	%	Dinas Perhubungan
		Persentase Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi	%	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya perencanaan kapasitas mobilisasi orang dan distribusi barang serta terpenuhinya kebutuhan pertahanan keamanan di kawasan perbatasan	%	Dinas Perhubungan

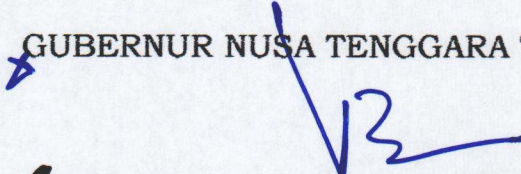
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILO LAISKODAT

LAMPIRAN XV : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 96 TAHUN 2022
TANGGAL : 15 September 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023

URUSAN PEMERINTAHAN YANG : • KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
DILAKSANAKAN

SASARAN STRATEGIS RPJMD	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi keolahragaan	Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	Proporsi pertambahan wirausaha muda termasuk kelompok disabilitas dengan data terpilah gender (2000 calon wirausaha pemuda)	%	Dispora
		Presentasi peningkatan perolehan medali dan cabor prestasi dan pendidikan	%	Dispora
		Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung pariwisata estate, total 7 cabor tradisional dan 6 cabor rekreasi	%	Dispora
		Presentasi peningkatan perolehan medali paralympik (medali %)	%	Dispora
		Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	%	Dispora

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

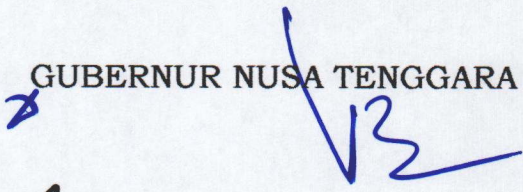
a

LAMPIRAN XVI : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 96 TAHUN 2022
TANGGAL : 15 September 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023

URUSAN PEMERINTAHAN YANG : • KEARSIPAN
DILAKSANAKAN • PERPUSTAKAAN

SASARAN STRATEGIS RPJMD	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DATA
Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	Cakupan Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan e-library	%	Dinas Arsip Perpus
		Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Perpustakaan berbasis Jejaring dan Fisik	%	Dinas Arsip Perpus
		Persentase Koleksi Daerah yang diserahkan ke Nasional setiap tahun (22 Kab/Kota	%	Dinas Arsip Perpus
		Cakupan Koleksi Naskah Kuno yang dilestarikan setiap tahun	%	Dinas Arsip Perpus
		Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	%	Dinas Arsip Perpus
		Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	%	Dinas Arsip Perpus
		Tercapainya Administrasi Urusan Perkantoran	%	Dinas Arsip Perpus

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILO LAISKODAT

9

LAMPIRAN XVII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 96 TAHUN 2022
TANGGAL : 15 September 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023

URUSAN PEMERINTAHAN YANG : • KELAUTAN DAN PERIKANAN
DILAKSANAKAN

SASARAN STRATEGIS RPJMD	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DATA
Tumbuhnya ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan	Meningkatnya kontribusi kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Share PDRB sub sektor perikanan dan kelautan terhadap PDRB sektor pertanian	%	DKP
Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	Meningkatnya kontribusi PAD kelautan dan perikanan terhadap pendapatan daerah	Presentase PAD kelautan dan perikanan terhadap pendapatan daerah	%	DKP
Terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan	Meningkatnya status pangan perikanan	Ketersediaan protein hewani berbasis olahan perikanan	kg/kapita/tahun	DKP
	Meningkatnya daya saing sub sektor perikanan dan kelautan	Nilai Tukar Nelayan (NTN) sektor perikanan	NTN	DKP
		Nilai Tukar Pembudidaya (NTP) sektor perikanan	NTP	DKP
Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (Attraction, Accessibility, Accomodation, Amenities dan Awareness) dengan pola pendekatan kawasan	Terwujudnya pemenuhan unsur 5A pariwisata dari sektor kelautan dan perikanan	Ketersediaan produk olahan perikanan di Pariwisata Estate	Jenis	DKP

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 96 TAHUN 2022
TANGGAL : 15 September 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PETERNAKAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023

URUSAN PEMERINTAHAN YANG : • PERTANIAN
DILAKSANAKAN

SASARAN STRATEGIS RPJMD	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DATA
Tumbuhnya Ekonomi Daerah secara Stabil dan Berkelanjutan	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	% PAD terhadap pendapatan daerah	%	Dinas Pernakan
	Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	Pertumbuhan Populasi Ternak	%	Dinas Pernakan

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

LAMPIRAN XIX : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 96 TAHUN 2022
TANGGAL : 15 September 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023

URUSAN PEMERINTAHAN YANG : • PANGAN
DILAKSANAKAN • PERTANIAN

SASARAN STRATEGIS RPJMD	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DATA
Tumbuhnya Ekonomi Daerah secara Stabil dan Berkelanjutan	Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap PDRB	Share PDRB sektor pertanian terhadap total PDRB	%	BPS
	Meningkatnya Pendapatan Petani	Nilai Tukar Petani	Poin	BPS
Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Kedauiatan Pangan	Meningkatnya keanekaragaman pangan yang dikonsumsi masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	BPS

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN XX : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 96 TAHUN 2022
TANGGAL : 15 September 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023

URUSAN PEMERINTAHAN YANG : • PARIWISATA
DILAKSANAKAN

SASARAN STRATEGIS RPJMD	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DATA
Pengembangan Pariwisata NTT melalui Pemenuhan Unsur 5A Pariwisata (atraksi, aksesibilitas, akomodasi, amenitas, awarnes) dengan pola pendekatan kawasan	Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui Pemenuhan Unsur 5 A Pariwisata di Kawasan Pariwisata Estate	Persentase pemenuhan Unsur 5A Pariwisata di Kawasan PE	%	Dinas Parekraf
		Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	Dinas Parekraf
Meningkatkan sumbangan pariwisata terhadap perekonomian daerah	Meningkatkan sumbangan pariwisata terhadap perekonomian daerah	Persentasi Pertumbuhan UMKM baru bidang Parekraf di Pariwisata Estate	%	Dinas Parekraf
		Lama Tinggal Wisatawan	hari	Dinas Parekraf
		Peningkatan Retribusi dari hasil Pengelolaan Aset	Rp	Dinas Parekraf

7
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
13
9 VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

LAMPIRAN XXI : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 96 TAHUN 2022
TANGGAL : 15 September 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023

URUSAN PEMERINTAHAN YANG : • ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DILAKSANAKAN

SASARAN STRATEGIS RPJMD	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DATA
Tersedianya sumber daya kelistrikan yang memadai dan murah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi rumah tangga dan mendukung kebutuhan ekonomi	Tersedianya sumber daya kelistrikan yang memadai dan murah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi rumah tangga dan mendukung kebutuhan ekonomi	Persentase potensi sumber daya mineral yang terkelola	%	Dinas ESDM
		Cakupan Pengelolaan Zona konservasi air tanah pada CAT setiap tahun	%	Dinas ESDM
		Cakupan Pengelolaan Zona konservasi air tanah pada CAT (Tahun 2019 = 41, Tahun 2023 = 59 Rektek)	%	Dinas ESDM
		Rasio elektrifikasi dari non EBT (bagi masyarakat tidak mampu, terpencil dan pedesaan)	%	Dinas ESDM
		Rasio elektrifikasi dari non EBT di destinasi wisata	%	Dinas ESDM
		Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik Berbasis EBT setiap tahun	%	Dinas ESDM
		Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik Berbasis EBT pada Kawasan Pariwisata Estate	%	Dinas ESDM

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

LAMPIRAN XXII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 86 TAHUN 2022
TANGGAL : 15 September 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023

URUSAN PEMERINTAHAN YANG : • PERINDUSTRIAN
DILAKSANAKAN • PERDAGANGAN

SASARAN STRATEGIS RPJMD	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DATA
Tumbuhnya Ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan	Meningkatnya kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap PDRB	% kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	Dinas Perindag
		% kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	Dinas Perindag
Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional	Meningkatnya nilai ekspor	% peningkatan nilai ekspor	%	Dinas Perindag

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

LAMPIRAN XXIII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 96 TAHUN 2022

TANGGAL : 15 September 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023**

URUSAN PEMERINTAHAN YANG : • SEKRETARIAT DAERAH
DILAKSANAKAN

SASARAN STRATEGIS RPJMD	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Meningkatnya Kualitas tata kelola penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pimpinan yang Berintegrasi dan Profesional dengan Berorientasi pada Pelayanan Publik	Persentase Tata Kelola Layanan Administrasi Pimpinan yang Efektif dan Efisien	%	Biro Adm. Pimpinan
		Nilai pelaksanaan Kualitas dan Kuantitas Layanan Keprotokolan	%	Biro Adm. Pimpinan
		Nilai pelaksanaan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha yang Transparan dan Akuntabel	%	Biro Adm. Pimpinan
	Meningkatkan koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan penataan urusan	Cakupan kegiatan tugas pemerintahan yang dilaksanakan setiap tahun	%	Biro Pemerintahan
		Cakupan kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan setiap tahun	%	Biro Pemerintahan
		Cakupan kegiatan penataan urusan yang dilaksanakan setiap tahun	%	Biro Pemerintahan
	Meningkatkan optimalisasi fasilitasi pelaksanaan kerja sama daerah	Cakupan kerja sama daerah yang difasilitasi setiap tahun	%	Biro Pemerintahan
	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan kesejahteraan rakyat	Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	%	Biro Pemerintahan
	Meningkatnya kualitas indeks keterbukaan informasi publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran secara optimal	%	Biro Perekonomian dan Adm. Pembangunan
		Persentase terlaksananya koorninasi pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang perekonomian dan Sumber daya Alam	%	Biro Perekonomian dan Adm. Pembangunan
		Jumlah Pelaksanaan Koordinasi, pembinaan dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD	Poin	Biro Perekonomian dan Adm. Pembangunan

SASARAN STRATEGIS RPJMD	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DATA
		Terwujudnya tata kelola monitoring dan pelaporan pelaksanaan administrasi pembangunan daerah dan wilayah di Provinsi dan kabupaten/Kota se-NTT		Biro Perekonomian dan Adm. Pembangunan
	Terlaksananya proses tender paket pengadaan barang/jasa Provinsi NTT sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase jumlah paket PBJ sesuai ketentuan (tender,non tender, e-purchasing, e-katalog)	%	Biro PBJ
	Tercapainya kuantitas dan kualitas kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola PBJ sesuai ketentuan-ketentuan dan peraturan/regulasi PBJ	Jumlah jabatan fungsional Pengelola PBJ	Orang	Biro PBJ
	Terlaksana PBJ yang terintegrasi, efisien, efektif, adil, transparan, bebas dan bersih dari KKN	Jumlah, jenis dan metode paket PBJ menggunakan SPSE (metode tender kompetitif)	%	Biro PBJ
	Meningkatnya indek pelayanan publik pemerintah daerah	Presentase perangkat Daerah yang efektif dan efisien	%	Biro Organisasi
	Terwujudnya pelayanan yang profesional terhadap kegiatan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	Meningkatnya pelayanan terhadap Kepala Daerah / Wakil Kepala daerah dan Sekretaris Daerah	%	Biro Umum
	Terwujudnya pengelolaan peraturan perundang-undangan	Persentase rancangan peraturan daerah yang diselesaikan setiap tahun	%	Biro Hukum
	Terwujudnya pengelolaan bantuan hukum	Cakupan Penyelesaian kasus hukum setiap tahun	%	Biro Hukum

8 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN XXIV : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 96 TAHUN 2022
TANGGAL : 15 September 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023

URUSAN PEMERINTAHAN YANG : • SEKRETARIAT DPRD
DILAKSANAKAN

SASARAN STRATEGIS RPJMD	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Meningkatnya Kelancaran tugas, fungsi dan peran DPRD	Peraturan Daerah yang ditetapkan	Perda	Sekretariat DPRD
		Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	%	Sekretariat DPRD
		Pengawasan peyelenggaraan pemerintahan	%	Sekretariat DPRD
		Persentase TL Temuan BPK dan APIP	%	Sekretariat DPRD
		Jumlah sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001: 2015	%	Sekretariat DPRD
		Persentase realisasi Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD	%	Sekretariat DPRD
	Meningkatnya ASN yang dapat berpikir dan bekerja secara inovatif, kreatif dan berintegritas	Jumlah inovasi dalam pelayanan	Inovasi	Sekretariat DPRD
	Meningkatnya administrasi Umum dan Kesekretariatan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	Sekretariat DPRD
		Jumlah dokumen administrasi Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Dokumen	Sekretariat DPRD

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

a

LAMPIRAN XXV : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 96 TAHUN 2022

TANGGAL : 15 September 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023**

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : • PERENCANAAN
• PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SASARAN STRATEGIS RPJMD	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Mewujudkan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	Persentase Konsistensi Penjabaran Program-Program RPJMD ke dalam RKPD Provinsi	%	Bappelitbangda
		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi Lingkup Bidang: Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	Bappelitbangda
		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi Lingkup Bidang: Sumber Daya Alam	%	Bappelitbangda
		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi Lingkup Bidang: Infrastruktur dan Kewilayahan.	%	Bappelitbangda
		Persentase Cakupan Pemanfaatan Hasil Pengendalian dan Evaluasi	%	Bappelitbangda
		Persentase Kebijakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya yang memanfaatkan Rekomendasi hasil Kelitbangan dan Inovasi yang dihasilkan setiap Tahun	%	Bappelitbangda
		Persentase Penyediaan Inovasi Daerah yang dihasilkan dari Inkubator Inovasi Daerah kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota atau pengguna lainnya setiap tahun	%	Bappelitbangda

SASARAN STRATEGIS RP. IMD	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DATA
		Persentase Produk Inovasi Daerah yang difasilitasi untuk mendapatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) setiap Tahun	%	Bappelitbangda

4

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

12

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

2

LAMPIRAN XXVI : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 96 TAHUN 2022
TANGGAL : 15 September 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023

URUSAN PEMERINTAHAN YANG : • KEUANGAN
DILAKSANAKAN

SASARAN STRATEGIS RPJMD	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan Dan Akuntabel	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang - undangan	%	BaKeuda

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

/ VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

LAMPIRAN XXVII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 96 TAHUN 2022
TANGGAL : 15 September 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023

URUSAN PEMERINTAHAN YANG : • KEUANGAN
DILAKSANAKAN

SASARAN STRATEGIS RPJMD	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah	Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	%	BPAD
	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada Peningkatan PAD	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah	%	BPAD
		Persentase Pemanfaatan, Pemindatanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	%	BPAD

✕ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

✍ VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

LAMPIRAN XXVIII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 96 TAHUN 2022
TANGGAL : 15 September 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023

URUSAN PEMERINTAHAN YANG : • KEPEGAWAIAN
DILAKSANAKAN

SASARAN STRATEGIS RPJMD	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif	Persentase Formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi	%	Badan Kepegawaian Daerah
		Terlaksananya lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 2 dan 1 lingkup provinsi	%	Badan Kepegawaian Daerah
		Persentase Realisasi Anggaran	%	Badan Kepegawaian Daerah
		Penyampaian Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan jasa	%	Badan Kepegawaian Daerah
		Penyampaian LKPD, LPPD/LKPJ dan LKIP	%	Badan Kepegawaian Daerah
		Rata-rata realisasi kinerja Individu dalam SKP minimal 90%	%	Badan Kepegawaian Daerah
		Memiliki sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001: 2015	%	Badan Kepegawaian Daerah
		Pengelolaan Tata naskah dinas dan penerapan tanda tangan elektronik melalui aplikasi e- NADI paling lambat 1 maret 2022	%	Badan Kepegawaian Daerah
		IKM terhadap Pelayanan Publik minimal kategori Baik (76,61-88,30)	%	Badan Kepegawaian Daerah
		Tingkat keterbukaan Informasi publik minimal kategori menuju informatif (75)	%	Badan Kepegawaian Daerah
		Jumlah PKS dengan lembaga mitra / NGO/LSM/pihak lain yang mendukung pencapaian target PD	%	Badan Kepegawaian Daerah

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

LAMPIRAN XXIX : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 96 TAHUN 2022
TANGGAL : 15 September 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGEMBANGAN SDM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023

URUSAN PEMERINTAHAN YANG : • PENGEMBANGAN SDM
DILAKSANAKAN

SASARAN STRATEGIS RPJMD	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Terwujudnya peningkatan pengendalian dan mutu diklat	Indeks Kepuasan pelayanan	%	
		Persentasi pelaksanaan Inovasi proyek perubahan pasca diklat	%	
		persentasi diklat yang mutu pelaksanaannya mempunyai nilai evaluasi memuaskan	%	
		tingkat serapan anggaran kegiatan kegiatan pengembangan SDM	%	
		jumlah kerja sama dengan lembaga lain	Dokumen	
		jumlah program diklat terakreditasi (Latsar, PIM, Program diklat lainnya)	Program	
		Persentasi tenaga pengajar (WI) pengelola, dan penyelenggara yang mengikuti pelatihan/penyegaran	%	
		Persentasi tenaga pengajar (WI) yang bersertifikat	%	
		Persentasi Pengelola/ penyelenggara yang bersertifikat	%	
		Persentasi KTI yang diseminarkan	%	
		Komposisi WI berdasarkan jenjang jabatan Ahli Muda	Orang	
	Meningkatnya kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis dan Fungsional, kompetensi sosial dan kultural serta kompetensi pemerintahan	Persentasi peserta pelatihan yang lulus	%	
		persentasi peserta pelatihan yang lulus dengan predikat sangat memuaskan	%	
		persentasi peserta pelatihan yang lulus dengan predikat memuaskan	%	
		persentasi peserta pelatihan yang lulus dengan predikat baik	%	
	Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana kediklatan sesuai standar kediklatan	Pembangunan Gedung/ ruangan/ pagar dan fasilitas lainnya	unit	

W

SASARAN STRATEGIS RPJMD	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DATA
		Pengadaan Sarana pendukung diklat berbasis digital	Paket	
		pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung dan fasilitas pendukung lainnya	Paket	
		Pemeliharaan Gedung/ ruangan/ pagar dan fasilitas lainnya	Unit	
		pemeliharaan kendaraan operasional	Unit	
		pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung dan fasilitas pendukung lainnya	Paket	
		jumlah kurikulum yang disusun	Dokumen	
		pengembangan sistem informasi pengembangan kompetensi	Aplikasi	
		jumlah media informasi dan publikasi yang tersedia	Media	
		jumlah media informasi dan publikasi yang aktif	Media	
	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Persentrasei pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	%	
		Persentrasei pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	%	

2 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

13

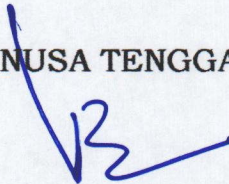
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN XXX : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 96 TAHUN 2022
TANGGAL : 15 September 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023

URUSAN PEMERINTAHAN YANG : • PENGAWASAN
DILAKSANAKAN

SASARAN STRATEGIS RPJMD	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemerinksaan BPK	%	Itda Provinsi NTT
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri	%	Itda Provinsi NTT
		Persentase Tindak Lanjut Inspektorat Daerah Provinsi NTT	%	Itda Provinsi NTT
		Cakupan SMA/SMK/SLB se- Provinsi NTT Yang Menjadi Obyek Pembinaan dan Pengawasan	%	Itda Provinsi NTT
		Persentase Reviu Dokumen RKPD, RKA, KUAPPAS,LKIP Pemda, Renja, DAK Fisik dan Rensira	%	Itda Provinsi NTT
		Indeks Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	%	Itda Provinsi NTT
		Peningkatan Kapabilitas APIP	Level	Itda Provinsi NTT
		Presentase Perangkat Daerah yang dilakukan Penilaian sebagai Zona Integritas	%	Itda Provinsi NTT
	Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah APIP yang berkompeten dalam bidang pengawasan	Jumlah Aparat Pengawas yang diangkat dalam Jabatan Fungsional bidang Pengawasan	orang	Itda Provinsi NTT
		Jumlah pejabat fungsional yang mengikuti Diklat Penjenjangan dan Substantif	orang	Itda Provinsi NTT

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT


LAMPIRAN XXXI : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 96 TAHUN 2022
TANGGAL : 15 September 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023

URUSAN PEMERINTAHAN YANG : • PENGELOLAAN PERBATASAN
DILAKSANAKAN

SASARAN STRATEGIS RPJMD	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Meningkatkan Cakupan Koordinasi, Integrasi, Dan Sinkronisasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama di Kawasan Perbatasan	Cakupan/Presentase Usulan Rencana aksi yang diusulkan ke BNPP dan MoU yang dihasilkan	%	BPPD Provinsi NTT
	Menigkatnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan kawasan perbatasan	Persentase koodinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan kawasan perbatasan	%	BPPD Provinsi NTT
	Meningkatnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan	Persentase monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan	%	BPPD Provinsi NTT

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

an

LAMPIRAN XXXII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 96 TAHUN 2022
TANGGAL : 15 September 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023

URUSAN PEMERINTAHAN YANG : • PEMERINTAHAN UMUM
DILAKSANAKAN

SASARAN STRATEGIS RPJMD	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Mewujudkan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	Cakupan Partai Politik, Lembaga Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan (141 Lembaga).	%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Cakupan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Pendidikan yang Terlibat dalam Program Peningkatan Peran Partai politik serta pengembangan etika dan budaya politik (309 Lembaga).	%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Cakupan Peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (49 Lembaga).	%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Meningkatnya ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya.	%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Cakupan Konflik Sosial yang ditangani setiap tahun.	%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

W
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
/ VIKTOR BUNGILU LAISKODAT
9

2

LAMPIRAN XXXIII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 96 TAHUN 2022
TANGGAL : 15 September 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023

URUSAN PEMERINTAHAN YANG : • PENGHUBUNG
DILAKSANAKAN

SASARAN STRATEGIS RPJMD	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Meningkatkan kualitas Pengelolaan Penghubung	Persentasi peningkatan urusan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	Badan peghubung
		Persentase peningkatan cakupan layanan Pemerintah Daerah dan KL	%	Badan peghubung
		Persentase peningkatan kualitas pembinaan masyarakat	%	Badan peghubung
		Persentase peningkatan kualitas promosi daerah	%	Badan peghubung

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILO LAISKODAT